

**PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK BERDASARKAN PSAK 45 DAN PP NO 71 TAHUN 2010 PADA BKAD KABUPATEN SRAGEN**

**Adi Penawan<sup>1)</sup>, Tri Widiyanto<sup>2)</sup>, Dr. Anggoro Panji<sup>3)</sup> Nugroho**  
**STIE “ADI UNGGUL BHIRAWA” SURAKARTA**  
*Corresponding : Tri.widiyanto@stie-aub.ac.id*

**ABSTRACT**

*The Community Empowerment Trust Fund is a continuation of special activities in managing revolving fund loans after the activities of the rural Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) ended in 2014, the rural Independent Community Empowerment Program (PNPM-MD) which was designed as an effort by the Government of Indonesia to empower rural communities in an integrated and sustainable way. PNPM-MD built the Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) and work units that support post PMPM Mandiri Rural programs, namely the Unit Pengelola Kegiatan (UPK), the Verification Team (TV) and the Badan Pengawas (BP). these work units are revolving fund management institutions with the function of empowering the poor and marginalized through lending for community capital that is deemed not bankable and visible from the eyes of formal financial institutions or banks and an important task of the managers of DAPM activities is to maintain sustainability and sustainability these revolving funds*

*Qualified and professional human resources are believed to be able to determine the vision, mission and goals of the organization, to achieve the vision, mission and goals of the DAPM Institutional organization, especially for BKAD the need for technical training in preparing financial reports on the use of social funds and Institutional funds that have been obtained from the results of the Sragen Regional Financial Management Unit. The required report must be able to reflect the position of the Cash Flow, Budget Realization Report and Balance Sheet so that it is easy to understand in accordance with PSAK 45 about the Public Sector financial statements which are strengthened by Government Regulation No. 5 of 2005 which has been updated to Government Regulation No. 71 of 2010*

*This service has been conducted on 29-30 April 2019 at the Syariah Hotel in Solo with participants comprising 40 BKAD Members of Sragen Regency consisting of the Chairperson, Secretary and Treasurer. This implementation uses a practice simulation method by making financial reports in accordance with PSAK 45 and PP no 71 of 2010 concerning public sector financial statements.*

*Keywords: Public sector financial statements, financial statement analysis.*

**ABSTRAK**

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014, Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) beserta unit kerja yang mendukung kegiatan paska program PMPM Mandiri Perdesaan, yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP). unit-unit kerja tersebut adalah lembaga pengelola dana bergulir dengan fungsi memberdayakan masyarakat miskin dan marjinal melalau pemberian pinjaman untuk modal usaha masyarakat yang dipandang tidak *bankable* dan *visible* dari mata lembaga keuangan formal ataupun Bank dan tugas penting dari para pengelola Kegiatan DAPM adalah menjaga kelestarian serta keberlanjutan dana bergulir tersebut.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional diyakini mampu menentukan visi, misi dan tujuan organisasi, untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi Kelembagaan DAPM, Khususnya untuk BKAD perlunya pelatihan secara teknis dalam pembuatan Laporan Keuangan terhadap penggunaan dana sosial dan dana Kelembagaan yang telah di dapatkan dari hasil surplus Unit Pengelola Keuangan Daerah Sragen. Laporan yang dibutuhkan harus bisa mencerminkan posisi Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca agar mudah di pahami sesuai dengan PSAK 45 tentang Laporan keuangan Sektor public yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Pengabdian ini telah pada 29 – 30 April 2019 di Hotel Syariah Solo dengan peserta adalah seluruh Anggota BKAD Kabupaten Sragen sejumlah 40 Peserta yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pelaksanaan ini menggunakan metode simulasi praktek dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 dan PP no 71 tahun 2010 tentang laporan keuangan sektor publik.

Kata kunci : *Laporan keuangan sektor public, analisa laporan keuangan.*

## PENDAHULUAN

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) beserta unit kerja yang mendukung kegiatan paska program PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP).

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional diyakini mampu menentukan visi, misi dan tujuan organisasi, untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi Kelembagaan DAPM, Khususnya untuk BKAD perlunya pelatihan secara teknis dalam pembuatan Laporan Keuangan terhadap penggunaan dana sosial dan dana Kelembagaan yang telah di dapatkan dari hasil surplus Unit Pengelola Keuangan Daerah Sragen. Laporan yang dibutuhkan harus bisa mencerminkan posisi Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca agar mudah di pahami sesuai dengan PSAK 45 tentang Laporan keuangan Sektor public yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2010. Selain itu dibutuhkan juga penataan Organisasi, pemilihan badan hukum, memperkuat struktur organisasi, menyusun aturan-aturan sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjalin kerjasama dengan pihak – pihak yang terkait.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut para pelaku DAPM harus bisa menjabarkan berbagai strategi diatas, namun demikian para pelaku pada berbagai level masih mengalami berbagai kendala/kelemahan berkaitan dengan kemampuan/kapasitas para Pengelola. Agar para Pengelola khususnya yang terkait dan bersinggungan langsung dengan kebijakan dalam implementasi pengelolaan keuangan masyarakat yang profesional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, maka perlu adanya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pembuatan laporan keuangan bagi badan kerjasama antar desa pengelola kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat kabupaten sragen.

## METODE DAN APLIKASI

### Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan pemahaman dan pembuatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan Peraturan pemerintah no 71 tahun 2010. Adapun pelaksanaan kegiatan PKM ini telah dilaksanakan pada hari Senin - Selasa tanggal 29 – 30 Mei 2019 di hotel Syariah Surakarta dimulai pukul 10.00 wib - selesai, yang diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Unit pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kerjasama Antar Desa Kabupaten Sragen.

Metode yang digunakan dari kegiatan pelatihan dan pendampingan ini yaitu :

1. Metode ceramah dan penyampain materi oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta menyampaikan materi analisa laporan keuangan sektor publik berdasarkan PSAK 45 dan PP no 71 tahun 2010.
2. Pelatihan Membuat Laporan keuangan yang dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta dengan contoh kasus yang telah disiapkan sebelumnya yaitu laporan keuangan riil yang masih sederhana dari BKAD Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
3. Diskusi dan Tanya jawab , tim Pengabdian Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya mengenai hal-hal belum jelas mengenai materi yang disampaikan
4. Konsultasi berkelanjutan kepada tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta jika masih diperlukan.

Adapun persoalan umum yang dihadapi adalah bagaimana mempersiapkan format laporan keuangan secara komputerisasi agar hasil pelatihan membuat laporan keuangan ini dapat digunakan secara berkelanjutan pada kantor DAPM di Wilayah Kabupaten Sragen. Metode pendampingan diperlukan sehingga perlu adanya motivasi dan pelatihan untuk selalu membuat laporan keuangan secara rutinitas setiap kali terjadi transaksi yang berhubungan dengan laporan keuangan organisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu diharapkan Pengelola kegiatan dana amanah pemberdayaan Masyarakat sudah mampu memahami dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu PP no 71 tahun 2010 tentang keuangan sektok publik.

Dalam membuat laporan keuangan bilamana tidak sesuai dengan standar yang ada maka dapat terjadi hal – hal buruk yang dapat membuat pembaca laporan keuangan sulit memahami dan mengambil keputusan. Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk diantaranya adalah :

1. Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik { pemerintah } akan menurun.
2. Para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
3. Mempengaruhi pengambilan keputusan.
4. Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja.
5. Laporan keuangan tidak dapat diaudit

Oleh karena banyak dampak buruk jika pembuatan laporan keuangan tidak dilakukan berdasarkan standar yang ada, maka ada beberapa tujuan dalam pembuatan laporan keuangan diantaranya adalah :

1. Kepatuhan dan pengelolaan Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan organisasi Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa { pelayanan } di masa yang akan datang.
5. Hubungan masyarakat Laporan keuangan dapat memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Sumber fakta dan gambaran { source of facts and figures } :Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.Tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
  - a) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintah.

Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan adanya pelatihan pembuatan laporan keuangan sektor publik pada lembaga unit pengelola kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Sragen diharapkan pada organisasi BKAD pada unit DAPM dapat membuat laporan keuangan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan PP no 71 tahun 2010

Setelah diadakan pelatihan pembuatan laporan keuangan sektor publik dan peserta telah dapat membuat laporan keuangan yang benar maka diharapkan tidak ada lagi dana dari pemerintah yang tidak efektif dan efisien dalam pengelolaannya terhadap masyarakat.

Dengan diadakan pelatihan ini semoga dapat merubah pemikiran terhadap masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan dana yang ada pada lembaga pemerintahan khususnya pada organisasi Badan Kerjasama Antar Desa

#### DAFTAR PUSTAKA

Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. "Pengantar Manajemen". Yogyakarta: Graha Ilmu

Dewi, Shanti Nugrahani. 2011. E-Commerce Untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil Dan Menengah. SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis. No 1,-Januari

*Hasibuan*, Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara

Indrajit, 2001, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object. Bandung: Informatika.

Mariana Kristiyanti, 2012. "Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Strategi Menghadapi Persaingan Global", Majalah Ilmiah INFORMATIKA, Vol. 3, No. 2, Hal. 93-116

Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.

Munawir, S, 2007, Analisa Laporan Keuangan.Edisi Keempat, Yogyakarta: Penerbit Liberty

Widjajanto, Nugroho, 2001, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Erlangga

PSAK 45

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Laporan keuangan sektor publik